

Peran Ma'ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019

Ahmad Sanusi; ahsanhajie@gmail.com; UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Galih Gumilar; galihgumilah72@gmail.com; UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The appointment of Ma'ruf Amin as Jokowi's running mate in the presidential election of 2019 resulted in pros and cons among political elites in the country. This paper, thus, aims at explaining the dynamic of political communication that allowed the appointment of Ma'ruf Amin as Jokowi's running mate in the election. This paper concludes that Ma'ruf Amin has a unique political position among other potential running mates. As a senior ulama with records of political positions during his career, Ma'ruf Amin has the potential to boost votes for Jokowi in the upcoming election, especially from the traditional Muslim of Nahdatul Ulama, the largest Muslim organisation in the country, and in the world. Moreover, by appointing Ma'ruf Amin, one of the highest rank ulamas in Nahdatul Ulama, Jokowi can get rid of the stigma of himself being not friendly to Islam as he has been target of black campaigns for years.

Keywords: Indonesian Presidential Election, Ma'ruf Amin effect, and political communication.

Abstrak

Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden dari Joko Widodo menuai banyak pro dan kontra di kalangan elit politik tanah air. Penelitian ini, oleh karena itu, bertujuan untuk mengungkap dinamika komunikasi politik yang melatarbelakangi pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posisi Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi memiliki daya tarik tersendiri. Dikenal sebagai salah satu ulama senior di Indonesia, pengalaman Ma'ruf Amin menjabat sebagai posisi di pemerintahan dan organisasi Islam membuatnya menjadi pribadi yang cukup diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air. Peran Ma'ruf Amin sebagai ulama nantinya diharapkan dapat meraup banyak suara dari kalangan kaum Nahdiyyin dan masyarakat Islam lainnya. Selain itu, dengan terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais Am Nahdlatul Ulama diharapkan stigma negatif masyarakat terhadap Joko Widodo terkait dengan politik identitas berkurang.

Kata kunci: Komunikasi politik, pemilihan Presiden RI, dan Pengaruh Ma'ruf Amin.

Pendahuluan

Sejak didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 sampai dengan saat ini, NU telah banyak mengalami pasang surut dalam kaitannya dengan kerekatan hubungan NU dengan penguasa. Tidak sedikit kyai NU yang berkecimpung dalam dunia politik seperti KH. Bisri Syamsuri yang menjadi Majelis Syuro PPP, KH. Wahab Hasbullah yang menjadi menteri Agama, KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden. Hubungan yang dinamis antara NU dengan pusat kekuasaan di Indonesia masih akan terus berlangsung pada masa-masa mendatang.¹

Sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berpotensi untuk dekat dengan penguasa, adalah hal yang wajar jika Nahdatul Ulama (NU) menjadi pendukung pemerintah yang sah pada saat ini, yaitu Pemerintahan Joko Widodo sebagai bentuk pemosisian politik yang diambil oleh NU dalam menyikapi dinamika politik praktis di Indonesia.

Jika dilihat dari sejarahnya, pada periode sekarang sangat wajar jika dari elit politik Nahdatul Ulama yang berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyodorkan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Am Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Dilihat dari *track record* seperti itulah maka KH. Ma'ruf Amin sangat layak untuk dicalonkan menjadi wakil Presiden mendampingi Joko Widodo.²

Mengingat hubungan NU dengan penguasa yang sangat erat, kita bisa melihat beberapa jejak para elit Nahdatul ulama dari masa ke masa yang mencakup hubungan yang harmonis, hubungan yang bersifat resiprokal, dan hubungan yang bersifat akomodatif.

Periode awal orde Baru hingga 1970-an mencerminkan pola hubungan yang harmonis antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru. Pada periode

¹ Greg Fealy and Robin Bush, "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama," *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 536–60.

² Lihat, Ahmad Zaki Fadlur Rohman, "Kristalisasi Faksionalisme PKB Dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004," *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2015).

ini, negara memiliki kekuasaan yang besar dalam hal penguasaan terhadap wacana ideologi dan politik yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya karena pemerintah pada periode ini mengarusutamakan gerakan modernisasi yang dianggap sebagai solusi untuk membangun negara. Pilihan terhadap modernisasi yang identik dengan pemihakan terhadap demokrasi liberal memungkinkan Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara. Meski begitu, periode ini juga ditandai dengan banyaknya penolakan, atau setidaknya, sikap yang reaktif dari kalangan kelompok Islam tradisional terhadap ide modernisasi yang digalakkan oleh pemerintah. Pada periode inilah sejumlah besar aktor intelektual dari kalangan kelompok Islam muncul dan menjembatani kepentingan pemerintah dengan kelompok Islam.

Periode 1980-an mengindikasikan hubungan yang resiprokal antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru. Timbal balik tersebut terutama sekali berkaitan dengan munculnya kesamaan persepsi tentang format politik yang dapat mempertemukan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam periode ini, pemerintah Orde Baru semakin menyadari bahwa kelompok Islam tidak selamanya dapat dipinggirkan dari panggung politik nasional dan kebijakan pamarjinalan tersebut hanya akan berujung pada hal-hal yang berlawanan dengan semangat pembangunan.³

Selanjutnya, dekade 1990-an ditandai dengan hubungan yang semakin erat antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru. Pada periode ini, pemerintah Orde Baru terlihat berupaya untuk menarik simpati dari kelompok Islam melalui sejumlah kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok Islam, salah satunya adalah dengan didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990.⁴

Dinamika perpolitikan di Indonesia yang melibatkan kelompok-kelompok Islam pada dasarnya sangat cair dan dinamis. Meskipun memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama dalam perpolitikan nasional, kelompok-

³ Aminuddin, *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 20–21.

⁴ M. Syafii Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 9–10.

kelompok Islam di Indonesia, sebagaimana di negara-negara mayoritas muslim lainnya, adalah entitas yang tidak bersifat monolitik. Artinya, kelompok-kelompok Islam itu sendiri memiliki tingkat keragaman yang tinggi.

Dewasa ini, sejumlah ahli banyak menengarai bahwa kembalinya “islam” ke ruang publik di Indonesia akan mewarnai secara cukup dramatis peta perpolitikan di Indonesia. Kehadiran kembali kelompok-kelompok Islam sebagai aktor-aktor utama dalam proses distribusi kekuasaan di Indonesia tidak terlepas dari komunikasi politik, yang sengaja atau tidak sengaja, yang telah dilakukan sejak lama, termasuk yang berkelindan dengan komunikasi politik dalam bingkai dakwah Islam. Dalam hal ini, ulama adalah tokoh sentral yang memainkan peran penting dalam membingkai wacana politik yang berpadu dengan isu-isu agama.⁵

Pemilu presiden di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 2019 ini adalah salah satu kesempatan untuk mengamati dinamika politik yang melibatkan kelompok-kelompok islam dengan penguasa dalam atmosfer politik yang demokratis. Pemilihan Ma'ruf Amin oleh calon presiden Joko Widodo (*incumbent*) adalah salah satu langkah politik penting sebagai konsekuensi dari akumulasi komunikasi politik yang melibatkan kelompok-kelompok Islam di Indonesia, terutama kelompok Islam yang lebih konservatif.

Biografi Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin lahir pada tahun 1943 di Kresek, Tangerang. Sebagai seorang keturunan dari ulama besar, Sheikh Nawawi al-Bantani, yang pernah menjadi seorang imam di Masjidil Haram, Mekkah, Ma'ruf Amin yang saat ini berusia 75 tahun menikmati privilege khusus di tengah lingkungan ulama di Indonesia. Pernah menjabat pada dua organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan lembaga semi pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin tidak lepas dari sejumlah kontroversi, terutama ketika MUI mengeluarkan sejumlah fatwa yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak minoritas agama di Indonesia.

⁵ Lihat, Ken Miichi, “Democratization and ‘Failure’ of Islamic Parties in Indonesia,” in *Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization*, ed. Ken Miichi and Omar Farouk (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 127–44, https://doi.org/10.1057/9781137436818_7.

Pendidikan Ma'ruf Amin dimulai saat ia mengikuti Sekolah Rakyat pada tahun 1955 di Banten. Bersamaan dengan itu, ia juga mengikuti pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang. Tahun 1958 ia pindah ke Jawa Timur untuk menjadi santri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pendidikan Tinggi ditempuh Ma'ruf Amin pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Ibnu Chaldun Bogor pada tahun 1967. Selain itu, pada tahun 1963 Ma'ruf Amin juga tercatat sebagai seorang santri di Banten.

Perjalanan karir Ma'ruf Amin tidak terlepas dari dunia pendidikan dan politik. Sempat menjadi dosen tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama pada tahun 1968 kemudian menjabat sebagai Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Jihad. Ia juga pernah merambah dunia politik dengan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari utusan golongan tahun 1971-1973. Ma'ruf Amin juga aktif di partai politik. Tercatat ia pernah mengetuai Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI, lalu menjadi anggota MPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1997 s-d 1999. Terakhir, ia tercatat sebagai anggota komisi II DPR-RI dari fraksi PKB tahun 1999.

Ma'ruf Amin merupakan seorang aktivis pada organisasi-organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pernah menjadi Ketua Anshor Jakarta 1964-1966, menjadi ketua Nahdlatul Ulama tahun 1966-1970, anggota Pengurus Lembaga Dakwah PBNU tahun 1977-1989, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat 1996, Komisi Fatwa MUI 2001-2007 dan yang terakhir menjabat sebagai Ketua MUI 2007-2010.⁶

Selain berkarir di dunia pendidikan dan politik, Ma'ruf Amin juga tercatat pernah berkarir pada dunia perbankan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada sejumlah bank dan perusahaan asuransi syariah seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Di sela kesibukannya, Ma'ruf Amin juga adalah seorang penulis yang cukup produktif. Sejumlah buku yang ditulisnya antara lain adalah *Fatwa dan Sistem Hukum Islam* (2008), *Era Baru*

⁶ Suriyanto, "Ma'ruf Amin, Kiai Nomor Satu NU Dan Cicit Imam Masjidil Haram," nasional, accessed November 21, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203105345-20-191044/maruf-amin-kiai-nomor-satu-nu-dan-cicit-imam-masjidil-haram>.

Ekonomi Islam Indonesia (2011), dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah (2013).

Ma'ruf Amin mendapatkan sejumlah gelar kehormatan di pada dunia pendidikan tinggi. Pada tahun 2012, Ma'ruf Amin mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 2017 ia dikukuhkan sebagai seorang guru besar (professor) di bidang Ekonomi Muamalat oleh UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur.

Sosok Ma'ruf Amin sebagai ulama tidak terlepas dari kontroversi. Calon Wakil Presiden dari Joko Widodo ini sering menjadi sorotan karena sejumlah pernyataannya saat menjabat sebagai ketua MUI. Saat di MUI, ia pernah menghimbau agar umat Islam tidak mengucapkan selamat natal kepada penganut agama Kristen dengan mengutip fatwa MUI yang melarang mengikuti perayaan natal. Pada tahun 2016, Ma'ruf Amin melalui MUI dan sejumlah ormas Islam lainnya mendeklarasikan penentangan terhadap eksistensi kelompok LGBT dan mendukung tindakan pidana bagi para pelaku LGBT. Sikap MUI yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin di antaranya adalah menolak segala propaganda, promosi, dukungan dan perkembangan LGBT di Indonesia serta menyatakan bahwa MUI akan mendorong penegakan hukum terhadap kelompok LGBT.⁷

Berita yang paling menyedot perhatian masyarakat terhadap Ma'ruf Amin adalah ketika Ketua MUI mengeluarkan fatwa yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terbukti melakukan aksi penistaan agama selama masa Pro-kontra yang mengiringi kasus Ahok pada saat itu. Ada yang menyatakan Ahok tak bermaksud menistakan ayat Al-Qur'an, ada juga yang bersikeras menyebut Ahok melecehkan agama Islam. Ma'ruf Amin melalui MUI bersikap dengan mengeluarkan pendapat yang pada intinya menyebut Ahok telah menghina Al-Qur'an dan ulama. Fatwa itu diterbitkan tepat pada saat masa pemilihan Gubernur

⁷ Syailendra Persada, "Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf Amin - Pilpres Tempo.Co," accessed December 14, 2018, <https://pilpres.tempo.co/read/1115995/menolak-ucapan-selamat-natal-ini-lima-kontroversi-maruf-amin>.

DKI Jakarta tahun 2017. Ma'ruf Amin bahkan tercatat menjadi salah satu saksi yang memberatkan Ahok sehingga posisinya semakin tersudutkan.⁸

Peran Ma'ruf Amin Sebagai Ulama Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim

Status Ma'ruf Amin sebagai salah seorang Ulama di Indonesia setidaknya menjadi daya tarik dalam meraih suara kaum santri dan kalangan pesantren. Jokowi cukup memahami bahwa suara sejumlah kelompok umat Islam sangat menentukan kemenangannya dalam Pilpres 2019 mendatang. Bayangkan saja, satu decade terakhir pergerakan masa Islam sangat massif dan bisa dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam peta perpolitikan tanah air. Lebih dari itu, Ma'ruf Amin memiliki jejak kepengurusan dalam organisasi politik seperti NU dan menjadi ketua MUI menjadikan nilai tambah bagi pemilih Muslim ketika ingin memilih seorang pemimpin.

Penunjukan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden adalah salah satu langkah Jokowi untuk mengamankan suara umat Islam di Indonesia, terutama yang selama masa pemerintahannya berafiliasi atau simpatik dengan gerakan konservatif yang menggeliat beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, pemosisian Ma'ruf Amin juga dinilai sebagai langkah tepat untuk membentengi Jokowi dari sejumlah kampanye hitam sebagaimana yang pernah terjadi pada pemilihan presiden di tahun 2014 lalu.⁹

Seberapa besarkah daya tarik ulama dalam meraih suara pemilih muslim di Indonesia? jawabannya adalah sangat besar mengingat jumlah warga muslim di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mencapai 207.176.162 jiwa.¹⁰ Dengan status sebagai mayoritas, ulama memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan opini publik di kalangan masyarakat karena ulama pada dasarnya bermakna "orang pandai" yang memiliki

⁸ Gibran Maulana Ibrahim, "Masa Lalu Ahok-Ma'ruf Amin: Dari Persidangan Hingga Pilpres 2019," *detiknews*, accessed December 14, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4162466/masa-lalu-ahok-maruf-amin-dari-persidangan-hingga-pilpres-2019>.

⁹ La Januru, "ANALISIS WACANA BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MEDIA KOMPAS, JAWA POS DAN KEDAULATAN RAKYAT," *NATAPRAJA* 4, no. 2 (December 1, 2016), <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625>.

¹⁰ "Sensus Penduduk 2010 - Indonesia," BPS, accessed December 14, 2018, <http://sp2010.bps.go.id/index.php>.

pengetahuan luas.¹¹ Meski terminologi ulama sering digunakan untuk kepentingan politik, daya tarik ulama untuk kepentingan komunikasi politik adalah hal yang masih sangat laku di Indonesia. Di tengah geliat konservatisme agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, sosok Ma'ruf Amin yang diframing sebagai ulama tentu saja sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik di tengah masyarakat Indonesia.

Di kalangan para ulama sendiri, dalam hal ini di Indonesia, perdebatan tentang apakah Kyai sebagai sebutan tradisional untuk ulama sebaiknya masuk atau tidak masuk kedalam politik praktis adalah topik yang terus hangat diperbincangkan, baik oleh kalangan ulama maupun oleh kalangan selain ulama. Sebagian pihak menganggap bahwa ulama sebaiknya tidak masuk kedalam pusaran politik praktis sebab peran mereka sebagai pengayom umat dalam urusan agama tidak dapat dikompromikan dengan kepentingan politik yang seringkali sarat dengan kepentingan duniawi. Sebagian pihak lain bersikeras bahwa para ulama perlu masuk kedalam politik praktis agar memiliki kekuatan lebih besar dalam mewarnai kehidupan politik yang seringkali melenceng dari nilai-nilai agama.

Terdapat sejumlah argumen yang kuat terkait keberadaan Kyai (ulama) dalam lingkaran politik. Pertama, Islam tidak hanya merupakan seperangkat pengetahuan agama yang mengatur bagaimana para pemeluknya berhubungan dengan tuhan. Lebih dari itu, sebagian besar ajaran Islam pada umumnya berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, termasuk tentang bagaimana kekuasaan idealnya terdistribusi di kalangan masyarakat. Hal ini memberikan insentif yang sangat besar terhadap masuknya Kyai kedalam dunia politik praktis.

Kedua, secara historis para Kyai di Indonesia pada umumnya memang bagian dari politik praktis. Hal ini bisa dilacak sampai pada peran para kyai pada zaman kesultanan mataram di Jawa dan pusat-pusat kekuasaan lain di masa lalu di nusantara. Oleh karena itu, keberadaan para kyai dalam kancah perpolitikan di Indonesia memang adalah hal yang telah lama terjadi. Pada masa pra kemerdekaan para Kyai tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan melalui peperangan fisik namun juga melalui jalur diplomasi.

¹¹ Mattulada, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 3.

Ketiga, para Kyai di Indonesia memiliki kelekatan emosional dengan masyarakat. Kyai pada umumnya memiliki banyak pengikut (jamaah) yang memiliki loyalitas yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sepenuhnya rasional. Dengan begitu, keputusan politik yang dibuat oleh masyarakat (jamaah dari kyai) juga sangat bergantung pada bagaimana para Kyai tersebut mengkonstruksi realitas untuk ditawarkan kepada para jamaahnya. Hal ini tentu saja adalah insentif besar lain yang mendorong pada kyai untuk terlibat aktif dalam dunia politik praktis.

Di samping Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki pilihan lain yang kurang lebih setara pengaruhnya dengan Ma'ruf Amin, yaitu Mahfud MD. Mantan ketua mahkamah konstitusi itu ramai diperbincangkan di kalangan publik sebagai calon kuat untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Batalnya pilihan kepada Mahfud MD bahkan sempat membuat publik terkejut lantaran kuatnya dugaan bahwa ia akan maju sebagai wakil presiden. Di luar alasan ketokohan berupa Mahfud MD tidak sepenuhnya bisa diterima sebagai ulama meskipun ia berasal dari lingkungan NU dengan latar belakang pondok pesantren yang kuat, sejumlah ahli menduga bahwa batalnya Mahfud MD diangkat sebagai calon wakil presiden berkaitan dengan masalah usia. Mahfid MD yang tengah berusia 61 tahun oleh partai-partai koalisi dianggap berbahaya bagi masa depan politik mereka pasca Joko Widodo tidak bisa mencalonkan diri lagi. Sebaliknya, usia Ma'ruf Amin yang saat ini 75 tahun dianggap tidak begitu memberikan resiko baginya untuk mengamankan posisi presiden pada pemilu 2024 di masa depan.

Pilihan kepada Ma'ruf Amin bisa dilihat dalam dua perspektif: Pertama, akomodasi politik Jokowi kepada partai koalisi yang mendukungnya dan ditakutkan terbentuknya poros ketiga dari pecahnya dukungan partai koalisi yang bisa menggoyahkan suara Jokowi dalam Pemilu. Kedua, Jokowi memiliki kekhawatiran terhadap politik identitas mengingat banyaknya organisasi Muslim yang tidak pro terhadap kepemimpinan Jokowi. Ketakutan Jokowi dipersepsikan tidak ramah dengan kelompok pemilih Muslim membuat Jokowi harus menerima nama Ma'ruf

Amin. Sebagai Mantan Ketua MUI, Ma'ruf diharapkan mampu menetralsir terkait isu politik identitas yang melekat pada Jokowi.¹²

Secara sosiologis peran kyai ditengah-tengah masyarakat seperti dikemukakan itu, khususnya pada komunitas santri menjadikan posisinya sangat diistimewakan. Mereka dihormati dan nasihat-nasihatnya dipatuhi. Status sosial ekonomi mereka pada umumnya beragam; namun, pada umumnya berasal dari keluarga berada, memiliki tanah yang cukup luas, dan bahkan ada pula yang berasal dari kelompok bangsawan. Akumulasi dari status sosial dan kekayaan semacam itu, ditambah dengan luasnya pengetahuan keagamaan mereka, menjadikan kyai pemimpin kharismatik yang disegani. Kekuatan lain yang melekat pada diri figure kyai, konon terletak pula pada kehalusan dan kemampuan menafsirkan paham yang dianut, yang kemudian membuat mereka benar-benar sanggup melakukan peran yang oleh Geertz disebut sebagai *culture broker*, yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang dalam masyarakat. Kelebihan kyai seperti itulah yang akhirnya membuat kyai terlibat dalam kepemimpinan masyarakat dan juga dalam politik.¹³

Di kalangan NU, dikenal penokohan Kyai dengan spesialisasi keahlian tertentu. Misalnya, KH. Ali Yafie dikenal sebagai seorang ahli tafsir. KH. Sahal Mahfudz yang pada Mukhtar ke-30 di Lirboyo terpilih sebagai Rais Am PBNU dikenal sebagai ahli fiqih. KH. Sohibul Wafa Tajul Arifin yang lebih dikenal Abah Anom dari pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, dikenal sebagai ahli dan pengamat tarekat *qadariyah wa naqsabandiyah*.

Jika meminjam kategorisasi Nimmo, maka dengan menggunakan karakteristik diatas kyai-kyai tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok komunkator professional yang keahliannya mengendalikan keterampilan yang khas dalam mengolah symbol-simbol dalam memanfaatkan keterampilan ini untuk menenpa mata rantai yang menghubungkan orang-orang yang berbeda atau

¹² Burhanuddin Muhtadi et al., "Prabowo Pilih Sandiaga, Jokowi Pilih Ma'ruf, Kompromi Politik? Ini Analisis Para Ahli," accessed December 14, 2019, <https://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf-kompromi-politik-ini-analisis-para-ahli-101391>.

¹³ Imam Suprayogo, *Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 1–5.

kelompok-kelompok yang dibedakan sebagai komunikator politik, kyai memainkan peran sosial yang signifikan terutama dalam proses pembentukan opini publik. Dia adalah semacam makelar simbol, atau orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi tetap menarik dan mudah dimengerti. Di kalangan NU, adalah kyai yang menerjemahkan bahasa politik ke dalam bahasa agama mudah dipahami dan diterima para jamaahnya, sekaligus menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan politik untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam sesuatu proses politik.¹⁴

Diantara faktor-faktor yang memperkuat sosok kyai sebagai komunikator politik adalah karena kekuatan kharisma yang menyebabkan munculnya kepengikutan massa secara irrasional. Otoritas kharismatik, menurut Tischler, berperan sebagai sumber informasi diantara para pengikutnya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan kyai akan diterima secara *taken for granted* oleh para pengikutnya. Bagi kebanyakan masyarakat Muslim tradisional seperti pada umumnya warga *nahdliyin*, sosok kyai mendapat kedudukan sangat istimewa. Figure kyai ini penting bukan hanya karena kata-katanya yang menjadi fatwa, tetapi kehadirannya secara fisik pun sudah dipandang sebagai sumber keberkahan bagi para jamaahnya.¹⁵

Sosok Ma'ruf Amin jelas memiliki kharisma sebagai tokoh agama yang bijaksana. Ma'ruf Amin sebagai tokoh bangsa yang telah menduduki sejumlah posisi penting di lembaga negara mulai dari DPR hingga Watimpres. Ma'ruf Amin merupakan ulama kategori super karena sangat senior, seorang Profesor dan pernah menjabat Ketua MUI Pusat. Selain itu, posisi Ma'ruf Amin juga merupakan Rais Am Pengurus Besar NU. Dengan menjadikan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres, Jokowi telah mengamankan suara masyarakat NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas yang diterima semua kalangan, bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang multikultur dengan menggandeng

¹⁴ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdatul Ulama* (Surabaya: Jatayu Sala, 1989), 56–57.

¹⁵ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdatul Ulama* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 43–45.

tokoh NU diharapkan rakyat Indonesia bisa terayomi secara keseluruhan. Jokowi terlihat ingin membangun Indonesia dengan berduet bersama NU. Kiprah dan kontribusi NU terbukti sangat besar bagi bangsa Indonesia. Berkat NU, Indonesia yang notabene negara mayoritas Muslim terbesar di dunia mampu menghindari isu perpecahan seperti yang terjadi di negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah.

Mengingat lawan-lawan politik Jokowi selalu menyerang dengan isu-isu keislaman, Ma'ruf Amin dijadikan sebagai kunci untuk meng*counter* langkah liar lawan politiknya. Seperti yang kita ketahui Jokowi selama ini selalu mendapat tuduhan anti-Islam, kriminalisasi ulama, dan tidak berpihak kepada umat Islam. Sebab, dengan memilih Ma'ruf logikanya akan seperti ini: bagaimana mungkin seorang Jokowi membenci Islam pada saat yang sama dia berpasangan dengan seorang ulama terhormat. Mau tidak mau lawan politiknya harus memutar otak untuk melawan Jokowi karena harus berusaha bagaimana untuk meraih umat Islam sebagai pemilih mayoritas pada Pilpres 2019 mendatang.

Analisis Komunikasi Politik Ma'ruf Amin

Komunikasi politik merupakan hubungan timbal balik antara politisi dengan konstituen atau seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah politiknya. Pesan politik disampaikan demi menunjang pelaksanaan tugas secara politiknya. Diskusi atau pembicaraan antara politisi dengan konstituen umumnya membahas permasalahan politik, termasuk pesan politik. Pesan politik adalah makna dan aturan kata dalam pembicaraan politik. Pesan-pesan dari hasil pengaruh yang disampaikan para peserta komunikasi dapat menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat.

Pada beberapa kesempatan wakil calon Presiden dari Jokowi, Ma'ruf Amin kerap memberikan klarifikasi atas pesan komunikasi politik yang sering disampaikan oleh patnernya. Ia menilai, istilah politik genderuwo yang diucapkan Presiden Joko Widodo merupakan pernyataan simbolis agar dalam membangun komunikasi politik tidak menakut-nakuti. Menurut Ma'ruf, komunikasi politik harus membangkitkan optimisme Indonesia yang lebih baik. Kalau menebarkan rasa takut, kata Ma'ruf berarti seperti genderuwo, yang

memandang Indonesia secara pesimis. Padahal, optimisme sangat dibutuhkan membangun bangsa dan negara. Ma'ruf sepakat dengan Jokowi yang beranggapan bahwa politik genderwo tersebut ada dan nyata di Indonesia.

Baru-baru ini Ma'ruf Amin dikecam karena menyamakan pengkritik Jokowi sebagai orang *budek* dan buta karena mengingkari apa yang dilakukan pemerintah selama 4 tahun terakhir. Ma'ruf Amin seringkali dianggap bermasalah dengan komunikasi politiknya. Dosen Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menyatakan bahwa Ma'ruf ingin mencari simpati dengan diksi yang kerap bermasalah. Dalam konteks orang Banten misalnya, Ma'ruf dianggap hendak membangkitkan sisi emosional daerah tersebut. Ada kemungkinan Ma'ruf ingin menumbuhkan sentimen identitas tentang orang Banten. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus berkomunikasi dengan pantas dan apa yang dikatakan Ma'ruf jelas tidak masuk dalam kategori itu dikarenakan audiens kita beragam jadi harus berhati-hati ketika ingin mengeluarkan pendapat jangan hanya ingin mencari substansi sehingga mengeluarkan kata yang tidak elok.

Terkait dengan hal tersebut, perlu diingat bahwa tujuan utama dari komunikasi politik sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin adalah untuk membuat kesan yang baik di tengah masyarakat. Kesan tersebut terbentuk secara perlahan melalui penyebaran informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan respon tertentu dari khalayak yang terpapar oleh informasi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, informasi yang disebut tersebut, baik melalui media konvensional maupun media digital,

Sebagai seorang ulama citra yang ingin ditonjolkan oleh Ma'ruf Amin ialah jujur, bersih dari korupsi, dan religius. Pada dasarnya, citra Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak akan diubah demi Pilpres 2019. Ia akan tampil apa adanya sepanjang kampanye berlangsung. Meski sudah berusia lanjut, Ma'ruf tetap menampilkan sosok yang enerjik dan memiliki perilaku dan gagasan yang disukai generasi millennial. Ma'ruf Amin menjadi magnet tersendiri untuk menarik perhatian kalangan pemilih Muslim dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Pemilih Muslim lebih menyukai program ekonomi keumatan yang selalu digaungkan oleh Ma'ruf Amin. Ia lebih dipercaya mampu meningkatkan program penguatan ekonomi keumatan. Ma'ruf Amin memiliki pola yang baik dalam hal pendekatan

kepada organisasi-organisasi Islam dan pesantren-pesantren. Ia dinilai mampu menjadikan pemilih dari kalangan organisasi Islam dan pesantren-pesantren sebagai basis suara tersendiri.

Berdasarkan hasil survei mayoritas responden Muslim lebih menyukai karakter Ma'ruf dibanding dengan Sandiaga. Ada enam kategori yang menjadi perhatian responden, yaitu jujur, pintar, nasionalis, agamais, berwibawa, perhatian kepada rakyat dan tegas. Ma'ruf unggul di karakter jujur sebesar 52,3 persen, Sandiaga sebesar 43,9 persen. Di karakter pintar, Sandiaga unggul tipis sebesar 62,7 persen dibandingkan Ma'ruf sebesar 61,2 persen. Kemudian 58,2 persen responden menilai Ma'ruf sosok nasionalis, sementara 55,9 persen lainnya memilih Sandiaga. Selain itu, Ma'ruf unggul di karakter agamis sebesar 64,1 persen dibandingkan Sandiaga sebesar 47 persen. Pada karakter berwibawa, Sandiaga unggul sebesar 51 persen dari Ma'ruf sebesar 47,9 persen. Dalam kategori perhatian kepada rakyat, 49,9 responden memilih Ma'ruf, 43,3 persen memilih Sandiaga. Pada kategori pengambilan keputusan secara tegas, 32,8 persen responden memilih Ma'ruf, sedangkan Sandiaga sebesar 41,3 persen.¹⁶

Dari proses pencitraan yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi akan mengubah opini publik terhadap sosoknya yang selama ini diterpa isu politik identitas terutama berkaitan dengan isu SARA. Opini Publik sebagai sebuah kekuatan yang menyangkut kehidupan sosial dan politik, memiliki pengaruh yang sangat penting. Sebagai *bumper* yang akan melindungi Joko Widodo dari kampanye-kampanye hitam yang sarat dengan politik identitas, keberadaan Ma'ruf Amin juga dinilai penting karena secara jangka panjang perubahan opini publik tentang kepemimpinan Joko Widodo dapat membantu memperkuat undang-undang dan peraturan lain, mempertebal moral masyarakat dalam menerapkan undang-undang, dan mendukung keberadaan institusi-institusi sosial dan politik di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Dylan Aprialdo Rachman, "Survei LSI: Ma'ruf Amin Dinilai Mampu Dongkrak Suara Pemilih Muslim," accessed December 15, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17262891/survei-lsi-maruf-amin-dinilai-mampu-dongkrak-suara-pemilih-muslim>.

¹⁷ Pawito, *Komunikasi Politik Media Massa Dan Kampanye Pemilihan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 23.

Kesimpulan

Banyak pertimbangan dari pihak oposisi ketika Ma'ruf Amin maju ke Pilpres 2019. Sosoknya sebagai salah satu ulama senior di Indonesia dan pernah menjabat posisi penting seperti Ketua MUI dan Nahdatul Ulama menjadi modal besar dalam meraih simpatik dari masyarakat muslim yang adalah pemilih mayoritas pada Pilpres nanti. Citra ulama yang melekat pada dirinya setidaknya berpengaruh banyak pada suara terutama dikalangan santri dan pesantren. Sosok Ma'ruf Amin jelas memiliki kharisma sebagai tokoh agama yang bijaksana. Ma'ruf Amin sebagai tokoh bangsa yang telah menduduki sejumlah posisi penting di lembaga negara mulai dari DPR hingga Watimpres. Jokowi memilih Ma'ruf melalui proses pertimbangan, perenungan dan mendengar saran dari banyak pihak sehingga diharapkan nantinya duet mereka berdua akan memenangkan pasangan calon nomor urut satu ini pada Pilpres 2019 mendatang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zaki Fadlur Rohman. "Kristalisasi Faksionalisme PKB Dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004." *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2015).
- Aminuddin. *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Asep Saeful Muhtadi. *Komunikasi Politik Nahdatul Ulama*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Burhanuddin Muhtadi, Arya Fernandes, Ella S. Prihatini, and Nyarwi Ahmad. "Prabowo Pilih Sandiaga, Jokowi Pilih Ma'ruf, Kompromi Politik? Ini Analisis Para Ahli." Accessed December 14, 2019.
<https://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf-kompromi-politik-ini- analisis-para-ahli-101391>.
- Choirul Anam. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdatul Ulama*. Surabaya: Jatayu Sala, 1989.
- Dylan Aprialdo Rachman. "Survei LSI: Ma'ruf Amin Dinilai Mampu Dongkrak Suara Pemilih Muslim." Accessed December 15, 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17262891/survei-lsi-maruf-amin-dinilai-mampu-dongkrak-suara-pemilih-muslim>.
- Gibran Maulana Ibrahim. "Masa Lalu Ahok-Ma'ruf Amin: Dari Persidangan Hingga Pilpres 2019." *detiknews*. Accessed December 14, 2019.
<https://news.detik.com/berita/d-4162466/masa-lalu-ahok-maruf-amin-dari-persidangan-hingga-pilpres-2019>.
- Greg Fealy, and Robin Bush. "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama." *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 536–60.
- Imam Suprayogo. *Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Ken Miichi. "Democratization and 'Failure' of Islamic Parties in Indonesia." In *Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization*, edited by Ken Miichi and Omar Farouk, 127–44. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137436818_7.

- La Januru. "ANALISIS WACANA BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MEDIA KOMPAS, JAWA POS DAN KEDAULATAN RAKYAT." *NATAPRAJA* 4, no. 2 (December 1, 2016). <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625>.
- M. Syafii Anwar. *Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mattulada. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Pawito. *Komunikasi Politik Media Massa Dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- BPS. "Sensus Penduduk 2010 - Indonesia." Accessed December 14, 2018. <http://sp2010.bps.go.id/index.php>.
- Suriyanto. "Ma'ruf Amin, Kiai Nomor Satu NU Dan Cicit Imam Masjidil Haram." nasional. Accessed November 21, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203105345-20-191044/maruf-amin-kiai-nomor-satu-nu-dan-cicit-imam-masjidil-haram>.
- Syailendra Persada. "Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf Amin - Pilpres Tempo.Co." Accessed December 14, 2018. <https://pilpres.tempo.co/read/1115995/menolak-ucapan-selamat-natal-ini-lima-kontroversi-maruf-amin>.